

**PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DALAM KOORDINASI KONVERGENSI  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
DI KABUPATEN MUARA ENIM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1**

**Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**AFRA ABIDA EDLINA**

**NIM. 07011381924129**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2023**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

## PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KOORDINASI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MUARA ENIM

### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

AFRA ABIDA EDLINA

NIM.07011381924129


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,   Maret 2023

Pembimbing

Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP  
NIP. 198701052015041003



Mengetahui,  
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001



# HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

## PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KOORDINASI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN MUARA ENIM

### SKRIPSI

Oleh:

**Afra Abida Edlina**

**07011381924129**

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 5 April 2023

**Pembimbing:**

**Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP**

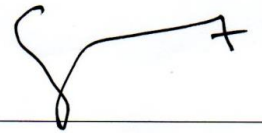
NIP. 196911101994011001



**Penguji:**

**Drs. Gatot Budiarto, M.Si**


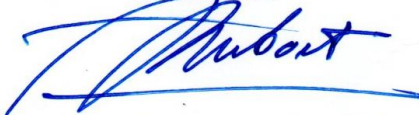
NIP.195806091984031002



**Drs. Mardianto, M.Si**

NIP. 196211251989121001



<p><b>Dekan FISIP UNSRI</b></p>  <p><b>Prof. Dr. Alfitri, M.Si</b> NIP. 196601221990031004</p>	<p><b>Ketua Jurusan</b></p>  <p><b>Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA</b> NIP. 196911101994011001</p>
---	---

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afra Abida Edlina  
NIM : 07011381924129  
Tempat dan Tanggal Lahir : Prabumulih, 24 Januari 2002  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi dengan judul **“Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Muara Enim”** ini adalah benar-benar karya ilmiah saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing yang telah ditetapkan, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak-benaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Maret 2023  
Yang membuat Pernyataan,



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Allah menciptakan langit dan bumi.

Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu,

Dia hanya berkata kepadanya, “jadilah!” maka jadilah ia.

(QS. Al-Baqarah : 117)

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini  
saya persembahkan kepada :**

- **Kedua orang tuaku, Ayah dan  
Mama**
- **Dosen Ilmu Administrasi Publik  
FISIP UNSRI**
- **Keluarga dan sahabat-sahabat  
terbaikku**
- **Diri sendiri dan Almamaterku**

## ABSTRAK

Stunting merupakan proses gagal tumbuh secara normal pada bayi saat lahir, yang akan berpengaruh pada keterbatasan kecerdasan yang dialami anak-anak di dalam usia emas yakni 2(dua) tahun. Prevalensi stunting di Kab. Muara Enim sebesar 22.80%. Bappeda sebagai *leading sector* dalam koordinasi percepatan penurunan stunting memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan koordinasi dengan para OPD yang terlibat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait Bagaimana Peranan Bappeda Dalam Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kab. Muara Enim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dan menggunakan pendekatan teori Hasibuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi.


Temuan penelitian menunjukkan bahwa Bappeda sebagai *leading sector* telah berperan dan mengikuti anjuran dari Bangda Kemendagri dalam pelaksanaan koordinasi 8(delapan) aksi konvergensi. Komunikasi dan koordinasi telah dilakukan bersama dengan 13(tiga belas) OPD yang terlibat melalui website Bangda Kemendagri dan pertemuan tatap muka dari tingkat desa sampai provinsi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan pembagian kerja dalam tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa masih terdapat kendala diantaranya: (1) Ego Sektoral, (2) Kebijakan Kepala Desa, (3) Penginputan Data tidak tepat waktu pada Website Bangda.

Kata Kunci : Stunting, Koordinasi, Pelaksanaan.

**Pembimbing,**

  
**Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP**  
**NIP. 198701052015041003**

**Palembang, 3 April 2023**  
**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP. 19691110199401001**



## ABSTRACT

*Stunting is a process where a baby fails to grow normally in terms of height and weight at birth, which will affect the cognitive development of children during the golden age of 2 years. The prevalence of stunting in Muara Enim Regency in 2022 was 22.80%. Bappeda as the leading sector in coordinating the acceleration of stunting reduction, has the main task and function of coordinating with the relevant agency. This research has a pupose to determine and analyze the role of Bappeda in coordinating convergence for accelerating stunting reduction in Muara Enim Regency.*

*This study uses a qualitative descriptive research method, with data collection through interviews and documentation, and uses Hasibuan's theory on factors influencing coordination.*

*Based on research findings, Bappeda as the leading sector has played a role and followed the guidance from Directorate general for regional development of in implementing coordination of the 8 convergence actions. Communication and coordination have been carried out together with 13 involved agency through the Directorate general for regional development website and through face-to-face meetings from the village, district, regency, and provincial levels as needed. The implementation is based on the division of tasks and functions that have been determined. In its implementation, there are still obstacles found, including: (1) Sectoral Ego, (2) Village Head Policy, (3) Data Input is not timely on the Bangda website.*

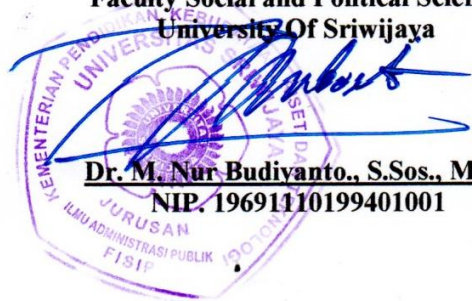
*Keyword: Stunting, Coordination, Implementation.*

Advisor,



**Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP**  
**NIP. 198701052015041003**

**Palembang, 3 April 2023**  
**Chairman of the Departement Of Public Administration**  
**Faculty Social and Political Science**  
**University Of Sriwijaya**



**Dr. M. Nur Budivanto., S.Sos., MPA**  
**NIP. 19691110199401001**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan banyak kenikmatan, rahmat dan hidayahNya. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terutama kepada Kedua orang tua tercinta Ayah Drs. (alm) M. Edy Marhan Jaya, M.Si dan Mama Liesna Kartikawati S.Sos yang telah memberikan doa, restu dan motivasi penulis untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Sena Putra Prabujaya S.AP., M.AP selaku pembimbing skripsi yang dengan ikhlas dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan serta kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Sofyan Effendi S.IP., M.Si selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu dalam proses perkuliahan.
7. Saudara/i yang ku sayangi Kakak Albar Le Mart S.Kom dan Ayuk Aisyawa Fildza Edyna S.E, yang memberikan doa dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya Angkatan 2019 kelas A Palembang.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Balitbangda, dan DPPKB Kab. Muara Enim yang telah memberikan izin penelitian dan bersedia menjadi informan penelitian.
10. Keluargaku Wawak Yusriati, Wawak Azwar, Wawak Ima, dan Wawak Alfi yang selalu menyuntikkan semangat dan memberikan doa restu bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
11. Sahabat seperjuanganku Bella, Syafira, Verronica, Lenniza, Aqila, Wahyu, Daffa, Anggi, Syafiq, Ipga, Ismat, dan Ali yang telah menemani penulis dan berbagi suka duka selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi, semoga Allah SWT mewujudkan cita-cita kita, Aamiin.
12. Sahabatku Poppy, Arini, Dita dan Liza yang telah memberi semangat, dukungan, dan keceriaan bagi penulis.
13. Kucing-kucingku yang menggemaskan, terimakasih telah menemani dan dapat menjadi penyegar pemikiran kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
14. Diri Sendiri, terima kasih telah berjuang di setiap proses perkuliahan dan pengerjaan sampai skripsi ini selesai.



15. Keluarga, sahabat, teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam proses perkuliahan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita.

Palembang, April 2023

Afra Abida Edlina

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan .....	9
1.4 Manfaat .....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Konsep Manajemen Sektor Publik.....	11
2.2 Fungsi Manajemen.....	12
2.3 Konsep Koordinasi.....	16
2.4 Tipe-Tipe dan Fungsi Koordinasi .....	17
2.4.1 Tipe-Tipe Koordinasi .....	17
2.4.2 Fungsi Koordinasi .....	18
2.4 Indikator Koordinasi .....	19
2.5 Peranan ( <i>Role</i> ).....	22

2.6	Penelitian Terdahulu .....	24
2.7	Kerangka Pemikiran.....	31
<b>BAB III</b>	.....	<b>32</b>
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	<b>32</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	32
3.2	Definisi Konsep .....	32
3.3	Fokus Penelitian.....	34
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5	Informan Penelitian.....	36
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7	Teknik Analisis Data.....	40
3.8	Keabsahan Data .....	42
3.9	Jadwal Penelitian .....	43
3.10	Sistematika Penulisan .....	44
<b>BAB IV</b>	.....	<b>47</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>47</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	47
4.1.1	Gambaran Umum.....	47
4.1.2	Bagaimana Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Koordinasi Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Muara Enim? .....	66
4.2	Pembahasan Penelitian.....	116
4.2.1	Bagaimana Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Koordinasi Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Muara Enim? .....	116
<b>BAB V</b>	.....	<b>154</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>154</b>
5.1	Kesimpulan .....	154
5.2	Saran .....	155
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>156</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>158</b>

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1.1 Target SSGI Stunting Provinsi Sumatera Selatan .....</b>	<b>5</b>
--	----------

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1 Lokus Prioritas Intervensi Stunting Sumatera Selatan 2017-2022.....</b>	<b>4</b>
<b>Gambar 1.2 Visualisasi Data Penelitian Stunting VOSviewer .....</b>	<b>7</b>
<b>Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>31</b>
<b>Gambar 3.1 Struktur Analisis Data Kualitatif.....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 4.1 Delapan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi dan Penanggungjawab .....</b>	<b>68</b>
<b>Gambar 4.2 Tampilan Website Bina Bangsa Kemendagri .....</b>	<b>71</b>
<b>Gambar 4.3 Komitmen Bupati Kab. Muara Enim dalam penanganan stunting ....</b>	<b>77</b>
<b>Gambar 4.4 Ketersediaan Anggaran.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....</b>	<b>35</b>
<b>Tabel 3.2 Informan Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 4.1 Struktur Organisasi Bappeda Kab. Muara Enim .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 4.2 Deskripsi Informan Penelitian .....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 4.4 Jenis Intervensi Program Percepatan Penurunan Stunting.....</b>	<b>90</b>
<b>Tabel 4.5 Tim Percepatan Penurunan Stunting Kab. Muara Enim .....</b>	<b>95</b>
<b>Tabel 4.6 Indikator Cakupan Layanan Kegiatan .....</b>	<b>96</b>
<b>Tabel 4.7 Jumlah dan Persentase Stunting Kab. Muara Enim 2018-2022.....</b>	<b>113</b>
<b>Tabel 4.8 Data Prevalensi Stunting Kab. Muara Enim 2022.....</b>	<b>116</b>
<b>Tabel 4.9 Hasil Analisis data stunting E-PGBM 2021-2022.....</b>	<b>117</b>
<b>Tabel 4.10 Matriks Temuan Penelitian.....</b>	<b>155</b>



## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Balitbangda:	Badan Penelitian Pengembangan Daerah
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
Dinkes	: Dinas Kesehatan
DPPKB	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
E-PPGBM	: Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat
Kab	: Kabupaten
Kec	: Kecamatan
Kemendagri:	Kementrian Dalam Negeri
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
RisKesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDM	: Sumber Daya Manusia
SSGI	: Survei Status Gizi Indonesia
TPPS	: Tim Percepatan Penurunan Stunting

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembukaan UUD 1945 alinea IV menyebutkan bahwa salah satu tujuan pemerintahan Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Indikator keberhasilan kesejahteraan masyarakat salah satunya meliputi terciptanya kesehatan anggota keluarga. Karena, masa depan suatu bangsa terletak pada kemampuan dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju dan berkualitas untuk investasi menghadapi masa depan. (Chaerunissa, 2020)

Dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, Indonesia sebagai negara berkembang nyatanya masih memiliki permasalahan di bidang kesehatan yaitu masalah gizi. Dalam hal ini baik gizi buruk dan gizi kurang tepat dengan jumlah yang cukup tinggi. Persoalan malnutrisi ini menjadi persoalan yang serius karena bisa mengakibatkan anak menjadi stunting dan keterbatasan dalam berpikir. Saat ini stunting menjadi salah satu program nasional yang masih terus diperbaiki dan menjadi isu prioritas kesehatan di Indonesia.

Stunting adalah proses gagal tumbuh secara normal baik tinggi dan berat badan bayi pada saat lahir. Hal ini akan berpengaruh pada keterbatasan kecerdasan yang dialami anak-anak di dalam usia 2 tahun. Penyebab utama dari stunting adalah bukan hanya dominan karena sebab gizi buruk pada masa kehamilan. Namun, terdapat juga faktor sosial ekonomi, ketersediaan pelayanan kesehatan seperti sarana dan prasarana air bersih dan fasilitas kesehatan lainnya. (Sutraningsih et al., 2021).

Salah satu tantangan bagi pemerintah dalam mengatasi stunting yaitu Indonesia memiliki ketersebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah yang cukup besar, dan hal ini dijawab dengan disusunnya Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang tercantum pada Peraturan Presiden No.72 pada pasal 6 ayat 2 yang meliputi 5 (lima) pilar, yaitu:

1. Komitmen dan visi kepemimpinan;
2. Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku;
3. Konvergensi program pusat, daerah, dan desa;
4. Ketahanan pangan dan gizi; dan
5. Pemantauan dan evaluasi.

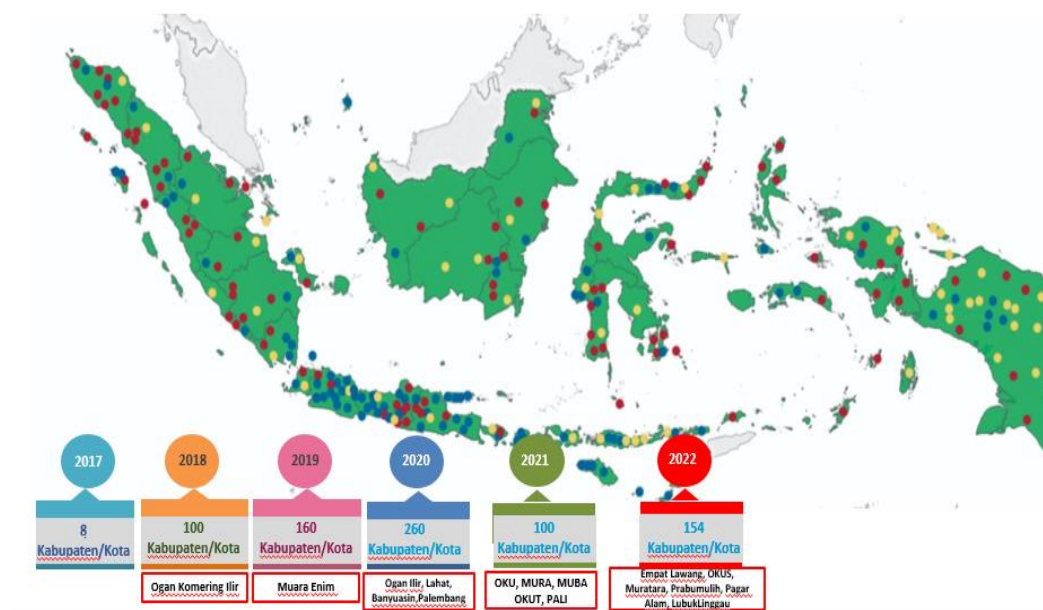
Pada pilar ketiga: konvergensi program pusat, daerah dan desa. Konvergensi percepatan penurunan stunting merupakan kerjasama yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama dengan tujuan pada sasaran prioritas penurunan stunting. Penyelenggaraan dilakukan dengan konvergen artinya dilakukan secara intergrasi dan penyelarasan dengan kegiatan dan program pada tingkat kab/kota sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu, peran Bappeda sebagai *leading sector* koordinasi diharapkan mampu mengendalikan OPD yang terlibat untuk turut serta dalam pelaksanaan program.

Saat ini landasan yang digunakan untuk penanganan stunting yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang

holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan. Pada tahun 2024 telah ditetapkan pada Peraturan Presiden pasal 5 ayat 1 bahwa dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting harus dicapai sebesar 14 persen.

Indonesia merupakan negara yang memiliki prevalensi stunting tinggi (36,4%) dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Philipina. Prevalensi stunting negara Indonesia merupakan tertinggi ketiga di Asia Tenggara dan kelima di dunia. Daerah prioritas yang menjadi lokus utama intervensi stunting adalah daerah yang memiliki angka prevalensi stunting tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Sejak program percepatan pencegahan stunting didirikan pada tahun 2018 lalu, ada 260 kabupaten kota menjadi wilayah prioritas program dan ditargetkan pada 2024 nanti seluruh kabupaten kota di Indonesia melaksanakan program percepatan pencegahan penurunan stunting.

**Gambar 1.1**  
**Lokus Prioritas Intervensi Stunting Terintegrasi Sumatera Selatan**  
**Tahun 2017-2022**



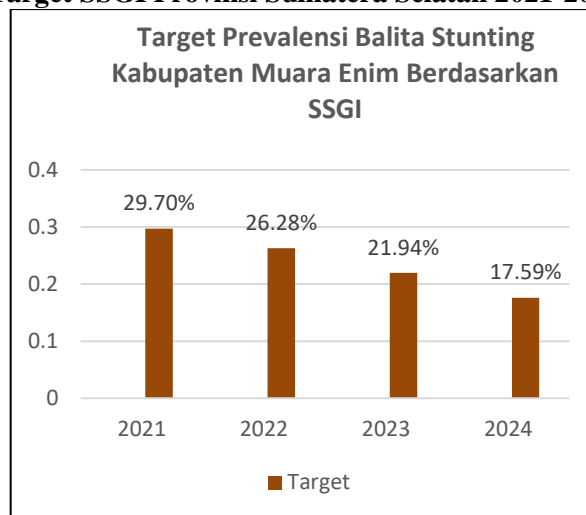
**Sumber: Bappeda Kab. Muara Enim, 2022**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muara Enim yang saat ini merupakan kabupaten ke 4 (empat) dengan jumlah prevalensi stunting terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut data SSGI Kab. Muara Enim memiliki prevalensi stunting tinggi sebesar (22.80%) dan berada diatas rata-rata Provinsi (18.6%). Penetapan lokus stunting prioritas pada Kabupaten Muara Enim sudah dilakukan sejak tahun 2018.

Berdasarkan data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) oleh Dinas Kesehatan untuk prevalensi stunting balita pada tahun 2019 terhitung 6,44% (1.152 jiwa) dari jumlah balita 65.735 jiwa. Tahun 2020 menurun

menjadi 7,49% ( 1.459 jiwa). Tahun 2021 menurun menjadi 3,23% (1.571 Jiwa). Dan tahun 2022 jumlah menurun menjadi 2,2% (980 Jiwa) dari jumlah balita 44.296 jiwa.

**Grafik 1.1**  
**Target SSGI Provinsi Sumatera Selatan 2021-2024**



**Sumber: Bappeda Kab. Muara Enim, 2022**

Sedangkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) oleh Kementerian Kesehatan RI untuk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2013 prevelansi stunting balita sebesar 46% (26.475 jiwa) dan pada tahun 2019 dari hasil Studi Status Gizi Indonesia(SSGI) persentase menurun menjadi 36.62%. Pada tahun 2020 tidak dilakukan perhitungan dikarenakan pandemi Covid-19, lalu tahun 2021 jumlah persentase stunting turun menjadi 29.70%, selanjutnya dari hasil perhitungan terakhir tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 22.80%. Sedangkan untuk target Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Sumatera Selatan dalam penurunan stunting pada tahun 2024 ditetapkan 17,59 persen.



Dampak dari tingginya prevalensi stunting di suatu wilayah bukan hanya berdampak pada permasalahan kesehatan, namun dapat berdampak pada hal multidimensional, yang dapat menjadi permasalahan dalam berbagai situasi di suatu negara. Dalam contoh kasus kecil, jika seorang anak mengalami permasalahan stunting, maka akan berpotensi pada lambatnya perkembangan otak, dan untuk jangka panjang bisa terjadi pada permasalahan kecerdasan dalam berfikir, keterbelakangan mental, dan resiko penyakit kronis yang akan menjadi permasalahan dimasa yang akan mendatang. Dalam prevalensi yang tinggi atau jumlah kasus yang banyak, maka akan berdampak pada masa depan bangsa, seperti kesejahteraan dalam perekonomian yang akan terganggu, kemajuan negara, daya saing rendah, dan lain sebagainya.

Untuk melakukan percepatan penurunan stunting tersebut terdapat peraturan yang tercantum pada Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada pasal 10 ayat 3 tentang penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bahwa, dalam rangka pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kota, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melakukan:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.
2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan.
3. Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Dari aturan Perpres tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menindaklanjuti terkait percepatan penurunan stunting dengan mengeluarkan surat keputusan Bupati Muara Enim Nomor 140/KPTS/DPPKB/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Muara Enim, diantaranya:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan.
2. Dinas Kesehatan, sebagai bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga.
4. Balitbangda, sebagai bidang data, monitoring, evaluasi dan *knowledge management*.

Instansi tersebut merupakan koordinator dalam tim percepatan penurunan stunting di Kab. Muara Enim. Ke-4 (empat) instansi tersebut memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan.



Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa dari penelitian yang telah dilakukan telah membahas mengenai permasalahan stunting dengan berbagai fokus penelitian. Dari penelitian tersebut, penulis melihat masih terdapat peluang penelitian terkait peranan sektor publik pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi percepatan penurunan stunting, karena dapat diketahui dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut terdapat rekomendasi atau saran mengenai peran sektor publik dalam penanggulangan stunting, namun jarang didapatkan penelitian yang membahas atau menjelaskan mengenai peran seperti apa dan bagaimana yang harus dilakukan sektor publik dalam koordinasi permasalahan stunting. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Muara Enim.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Muara Enim?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Muara Enim.

#### **1.4 Manfaat**

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat yaitu antara lain:

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam bidang akademik di masa depan. Selain itu, diharapkan dapat menambah referensi penelitian mengenai percepatan penurunan stunting khususnya pada Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Muara Enim dengan menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan masukan serta diaplikasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengenai koordinasi percepatan penurunan stunting yang dilakukan dengan OPD terkait, dengan harapan percepatan penurunan stunting dapat lebih optimal dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adamy, M. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia ; Teori, Praktik dan Penelitian. In *Kunststoffe International* (Vol. 106, Issue 12).
- Alfansuri, M. (2020). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Koordinasi Konvergensi Pencegahan Stunting Di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. *Jurnal IPDN*, 5(3), 248–253.
- Aridwan. (2018). Koordinasi Kepolisian Dengan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan Geng Motor Di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. In *Bitkom Research* (Vol. 63, Issue 2). UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Candarmaweni, & Yayuk Sri Rahayu, A. (2020). Collaborative governance to achieve SDGs social development: Preventing stunting lesson from Pandeglang. *E3S Web of Conferences*, 211, 1–9.
- Chaerunissa, S. F. (2020). *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang*. 17.
- Damayanti, D. (2021). Implementasi Program Penurunan Stunting Melalui Dana Desa (Study Di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas). *Public Policy and Management Inquiry*, 5(1), 242–255.
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 11–21.
- Herlianti, L. (2022). Collaboration of Actors in the Network in Stunting Prevention Programs in Bulukumba District. *Enrichment: Journal of Management*, 12(2), 2021–2026.
- Hidayat, M. S., & Pinatih, G. N. I. (2017). Prevalensi Stunting Pada Balita Di Wilayah



- Kerja Puskesmas Sidemen Karang Asem. *E-Jurnal Medika*, 2(1), 1–5.
- Priyono, P. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*, 16(2), 149–174.
- Ramadhan, K., Entoh, C., & Nurfatimah, N. (2022). Peran Kader dalam Penurunan Stunting di Desa. *Jurnal Bidan Cerdas*, 4(1), 53–61.
- Rizawhy. (2012). Public Management And New Public Management. *Articel.Journal*.
- Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 97–104.
- Sudarmanto et.al. (2020). *Manajemen Sektor Publik. Cetakan I*.
- Sutraningsih, W., Marlindawani, J., & Silitonga, E. (2021). Implementasi Strategi Pelaksanaan Pencegahan Stunting di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 (The Implementation of Stunting Prevention Strategy in Aceh Singkil District by 2019). *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(1), 49–68.
- Wiguna, A. R., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(1), 28.
- Yanti, R. (2020). *Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE.